

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Tinjauan Historis

Secara etimologis konsep tinjauan historis terdiri dari dua kata yakni tinjauan dan historis. Kata tinjauan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Sedangkan kata *historis* berasal dari bahasa Latin *istoria* yang memiliki arti kota *istoria* yaitu kota ilmu di Yunani. Kemudian kata *istoria* dalam perkembangannya diperuntukkan bagi pengkajian terhadap segala sesuatu mengenai masalah manusia secara kronologis. Pada perkembangan selanjutnya kata *istoria* juga diadopsi oleh bahasa Inggris dengan perubahan fonem menjadi *history* atau *historis* yang dipergunakan sebagai istilah untuk menyebut cerita tentang peristiwa dan kejadian yang dialami manusia pada masa lampau. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata historis dikenal dengan istilah sejarah. (Louis Gottschalk, 1975:7) Adapun pengertian historis atau sejarah adalah deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta –fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran. Pendapat lain mengatakan bahwa

Sejarah ialah salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau, beserta segala kejadian-kejadiannya dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh penelitian dan penyelidikan tersebut, untuk akhirnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah program masa depan.

(Purwantana, <http://www.edukasi.net/26-3-2008>)

Menurut J.V. Brice Sejarah adalah catatan-catatan dari apa yang telah dipikirkan dan diperbuat oleh manusia. Sedangkan menurut R.G Collingwood, sejarah ialah sejenis bentuk

penyelidikan atau suatu penyiasatan tentang perkara-perkara yang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau.

Sementara itu, sejarah juga diartikan sebagai gambaran masalah kehidupan manusia dan seputarnya meliputi lingkungannya yang disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan pemahaman tentang apa yang telah terjadi.
(Sidi Gazalba, <http://www.wordpress.com2007/11/14>)

Berdasarkan beberapa konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dijelaskan bahwa tinjauan historis memiliki pengertian sebagai suatu bentuk penyelidikan atau penelitian terhadap gejala peristiwa masa lampau baik individu maupun kelompok beserta dengan lingkungannya yang ditulis secara ilmiah, kritis dan sistematis meliputi urutan fakta dan masa kejadian peristiwa yang telah berlalu (kronologis), dengan tafsiran dan penjelasan yang mendukung serta memberi pengertian terhadap gejala peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mengungkapkan kembali peristiwa masa lampau yakni mengenai intrik dan perang suksesi yang pernah terjadi di Kerajaan Majapahit.

2.1.1 Konsep Intrik

Pada dasarnya kata Intrik dapat diartikan sebagai cara atau tindakan untuk menjatuhkan lawan melalui penyebaran kabar bohong atau palsu dengan tujuan untuk menghancurkan pihak lawan (Anonim,1997:385). Permainan intrik politik zaman sekarang berbeda pada zaman sebelum kemerdekaan, pada masa lampau permainan intrik bisa sampai menimbulkan perang saudara tetapi zaman sekarang intrik banyak dilakukan dengan cara terselubung agar pihak yang berperan akan terbebas dari segala tuduhan.

Intrik politik di Majapahit sudah muncul pada awal berdirinya dan terus berkembang hingga pada masa kemundurannya. Permainan politik yang disertai dengan intrik seringkali membawa dampak yang tidak baik, sebagai contohnya intrik yang diperankan oleh Mahapati Halayuda sebagai orang yang sangat berambisi untuk menjadi orang nomor satu di

Majapahit. Dalam prakteknya Mahapati tidak segan-segan menyebarkan kabar yang tidak benar sehingga banyak sekali pihak-pihak yang tidak bersalah menjadi korban. Dalam konteks masa kini intrik politik juga nampak dalam setiap peralihan kekuasaan dalam pemerintahan. Intrik-intrik terus bermunculan karena adanya keinginan dari masing-masing pihak untuk saling menjatuhkan.

2.1.2. Konsep Perang Suksesi

Pada dasarnya kata Perang dapat diartikan sebagai pertikaian antara dua kekuatan (Anonim,1997:752). Secara spesifik dan wilayah filosofis, perang merupakan turunan sifat dasar manusia yang sampai pada saat ini tetap memelihara dominasi dan persaingan sebagai sarana dalam memperkuat eksistensi diri. Berawal secara psikologis dan fisik, baik dilakukan secara berkelompok atau tidak perang dapat mengakibatkan kehancuran.

(Akbar Rahmawan,<http://blogspot.com/2009/08/pengertian-perang.html>)

Selain itu ada pula definisi perang yang dimaknai sebagai aksi fisik dan non fisik antara dua kelompok atau lebih untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Secara purba perang dimaknai sebagai pertikaian bersenjata, namun pada era masa kini perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Sedangkan mengenai pengertian suksesi secara harafiah dapat dipadankan dengan pergantian. Dalam bidang pemerintahan suksesi merupakan suatu keadaan dimana terjadi perubahan atau penggantian kedaulatan dalam suatu negara sehingga terjadi semacam pergantian negara yang membawa akibat-akibat hukum yang sangat kompleks. Dalam dunia politik suksesi pemerintahan merupakan fenomena yang lumrah terjadi dan lazimnya para pemimpin dituntut memainkan strategi politik, mengidentifikasi peta kekuatan oposisi berikut segala prediksi kemungkinan terjadinya suatu konspirasi bahkan konflik politik didalamnya.

Suksesi dalam pemerintahan dapat terjadi melalui kekerasan yakni melalui perang atau revolusi sedangkan suksesi yang terjadi tanpa kekerasan adalah terjadinya suatu perubahan wilayah secara damai. Sebagai contoh misalnya suatu wilayah secara sukarela menyatakan bergabung dengan wilayah lain dan menjadi bagian dari padanya tanpa melalui perang saudara.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perang suksesi yaitu perselisihan atau pertikaian yang terjadi pada saat pergantian pemimpin tertinggi dalam sebuah pemerintahan. Suksesi pemerintahan di Majapahit pasca pemerintahan Hayam Wuruk tidak berjalan dengan baik karena selalu disertai dengan perselisihan bahkan hingga pada perang saudara. Perang saudara dalam suksesi kepemimpinan yang berakibat pada lemahnya sistem politik dan ekonomi Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Dewi Suhita. Pemerintahan Dewi Suhita tidak berjalan dengan sempurna karena adanya perongrongan yang justru datang dari saudaranya. Pasca pemerintahan Dewi Suhita, suksesi pemerintahan Majapahit tetap mengalami kekacauan akibat adanya perebutan kekuasaan antar saudara yang masing-masing pihak mengklaim dirinya berhak menjadi raja dan berkuasa di Majapahit.

2.2 Kerangka Pikir

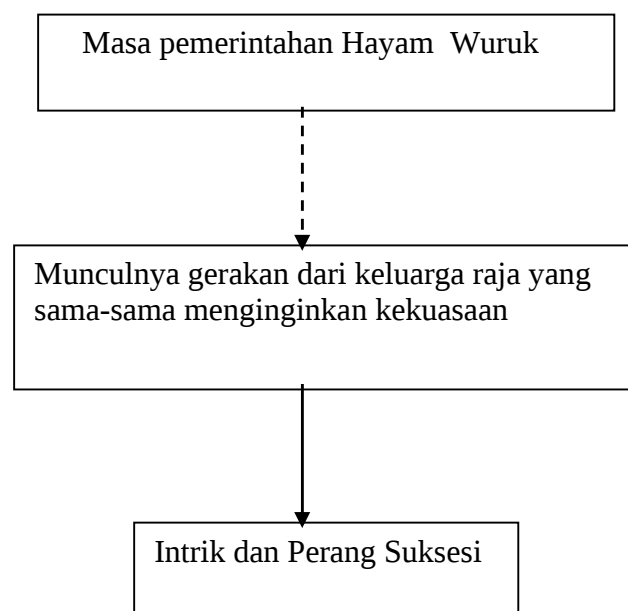
Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dimana wilayah kekuasaan Majapahit kala itu mampu menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Kehidupan sosial, ekonomi dan politiknya juga berjalan selaras menuju kepada arah kemajuan. Akan tetapi intrik politik di Majapahit tetap saja muncul dan terus berkembang hingga pada pemerintahan berikutnya. Adanya perbedaan pandangan antara keluarga mengenai warisan takhta menjadikan intrik-intrik tersebut semakin berkembang dengan pesat hingga menimbulkan perselisihan antar keluarga yang berkepanjangan.

Permasalahan di Majapahit tidak terselesaikan dengan baik, hingga pasca pemerintahan Hayam Wuruk Majapahit perlahan-lahan mengalami krisis kepemimpinan. Kaderisasi yang mengarah kepada penyiapan pemimpin selanjutnya tidak berjalan dengan baik, salah satu penyebabnya adalah pemilihan pemimpin yang didasarkan kepada keturunan bukan kepada keahlian. Kekuatan kerajaan Majapahit semakin melemah akibat munculnya perebutan kekuasaan dan berbagai intrik-intrik politik yang diperankan oleh para keluarga keturunan raja sehingga melemahkan kekuatan dan memudahkan kejayaan Majapahit yang telah terkelola bertahun-tahun. Perselisihan antar keluarga tidak dapat diselesaikan secara damai, masing-masing merasa dalam posisi kebenaran.

Perseteruan keluarga terjadi semakin tidak terkendali pasca pemerintahan Wikramawardhana. Hal tersebut disebabkan karena Wikramawardhana menyerahkan warisan takhta kepada puterinya Dewi Suhita. Kenyataan tersebut tidak dapat diterima oleh Wirabhumi putera Hayam Wuruk dari selir yang menganggap bahwa Ia lebih berhak menjadi raja meneruskan pemerintahan Majapahit daripada Suhita. Pada hakikatnya raja memang memiliki kekuasaan mutlak dimana segala keputusannya harus dan mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak. Akan tetapi dalam hal penobatan Suhita menjadi raja, Wirabhumi mempunyai alasan yang kuat untuk menentangnya karena Wikramawardhana hanyalah seorang raja yang berkuasa atas nama istrinya sedangkan Suhita adalah keturunan selir yang tidak memiliki hubungan darah langsung dari permaisuri sebagai pewaris takhta yang sah. Wirabhumi berupaya mengadakan *makar* untuk menggulingkan kekuasaan Suhita. Perseteruan tersebut berbuah pada perang saudara yang dikenal hingga kini sebagai perang *Paregreg*. Dalam peristiwa tersebut pihak Wirabhumi mengalami kekalahan, namun kekalahan Wirabhumi memupuk semangat para pengikutnya untuk melakukan perlawanan kembali sebagai wujud balas dendam atas kekalahan yang mereka terima.

Pasca kekalahan Wirabhumi dalam perang saudara tersebut Bhre Daha putera Wirabhumi berhasil menggulingkan kekuasaan Suhita. Namun pihak keluarga Suhita tidak tinggal diam dan kembali berupaya untuk merebut takhta dari tangan Bhre Daha. Dalam pembalasan tersebut pihak Suhita kembali dapat merebut kekuasaan, namun karena Suhita tidak memiliki keturunan maka pemerintahan dilanjutkan oleh adiknya yakni Kertawijaya. Kertawijaya digantikan oleh puteranya yakni Bhre Pamotan (Sang Sinagara), namun ketika Sang Sinagara wafat pada tahun 1453 terjadilah pertikaian takhta antara Samarawijaya (Bhre Kahuripan) dan Girisawardhana (Bhre Wengker). Kemelut antara paman dengan keponakan ini menyebabkan kerajaan Majapahit mengalami kekosongan dalam pemerintahan selama tiga tahun. Kevakuman takhta berakhir pada tahun 1456 ketika Girisawardhana menjadi raja dengan gelar Purwawisesa. Ketika Girisawardhana wafat pada tahun 1466, sengketta kekuasaan kembali muncul. Adik bungsu Sang Sinagara yakni Suraprabhawa juga berambisi untuk menjadi raja. Akhirnya Suraprabhawa menjadi raja Majapahit, namun ketika dua tahun masa pemerintahannya, anak-anak Sang Sinagara berkomplot dan berusaha menyusun kekuatan untuk merebut hak takhta dan pada tahun 1478 para putera Sang Sinagara memberontak kepada kekuasaan Suraprabhawa hingga menyebabkan kehancuran kerajaan Majapahit seiring dengan kemunculan kerajaan baru.

2.3. Paradigma



Keterangan :

-----▶ : Garis Pengaruh

————▶ : Garis Akibat

REFERENSI

Louis Gottschalk . 1975. *Mengerti Sejarah*. Universitas Indonesia: Jakarta. Halaman 7

Purwantana, dikutip dari : <http://www.edukasi.net/26-3-2008>

Sidi Gazalba, dikutip dari : <http://www.wordpress.com.2007/11/14>

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua* 1997.
Balai Pustaka: Jakarta.halaman 385

Ibid. halaman 752

Akbar Rahmawan, dikutip dari : <http://blogspot.com/2009/08/pengertian-perang.html>

Muljana, Slamet. 2005. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*.LKIS Yogyakarta: Yogyakarta. Halaman178